BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kredit

2.1.1.1 Pengertian Kredit

Pinjaman atau kredit terjadi berdasarkan persetujuan pinjam meminjam. Pengertian kredit yaitu :

" Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". (R. Firdaus dan Maya. A ; 2004:2)

Menurut Veitzhal Rivai (2006:4) dalam bukunya yang berjudul "Credit Manajemen Hand Book" pengertian kredit sebagai berikut:

" Kredit adalah penyertaan barang, jasa atau uang dari suatu pihak atas dasar kepercayaan terhadap pihak lain dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi pada tanggal yang telah di sepakati kedua belah pihak".

Dalam pengertian umum kredit didasarkan pada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayarnya dengan sejumlah uang pada masa yang akan datang.

Menurut Undang-Undang perbankan nomor 10 tahun 1998, pengertian kredit yaitu:

> "Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga".

Pinjaman atau kredit terjadi berdasarkan persetujuan pinjam meminjam antara kreditur dengan debitur yang mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya dalam jangka waktu tertentu disertai dengan sejumlah bunga tertentu.

2.1.1.2 Tujuan Kredit

Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang dianut oleh suatu negara yang bersangkutan yaitu dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) sebesar-besarnya.

Adapun tujuan pemberian kredit diatas adalah sebagai berikut :

1. Mencari keuntungan

   Bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh koperasi sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang diberikan kepada anggota.

2. Membantu usaha nasabah

   Tujuan lainnya adalah membantu usaha nasabah yang membutuhkan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu usaha Pemerintah

   Bagi Pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh perbankan maupun lembaga keuangan lainnya, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti ada peningkatan di berbagai sektor.

2.1.1.3 Fungsi Kredit

Fungsi kredit adalah sebagai berikut :

1. Dapat meningkatkan daya guna uang

   Para pemilik uang atau modal dapat secara langsung meminjamkan uang kepada para pengusaha atau anggota yang memerlukan uang untuk meningkatkan produksi atau meningkatkan usahanya.

2. Salah satu alat stabilitas ekonomi

   Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat, kebijakan diarahkan kepada usaha-usaha antara lain :

a. pengendalian inflasi

b. peningkatan ekspor

c. pemenuhan kebutuhan poko masyarakat

3. Dapat meningkatkan kegairahan usaha

   Setiap organisasi yang berusaha selalu ingin meningkatkan usaha tersebut, namun ada kalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan koperasi akan mengatasi kekurangan para anggota di bidang permodalan, sehingga akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

   Dengan bantuan kredit dari koperasi, para anggota koperasi dapat meningkatkan taraf hidup dan bisa digunakan untuk membuka usaha. Dengan demikian akan memperoleh pendapatan.

2.1.1.4 Unsur-Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan didasarkan atas kepercayaan ini berarti bahwa suatu lembaga kredit akan memberikan kredit jika sudah benar yakin bahwa anggota koperasi akan mengembalikan pinjaman sesuai dengan jangka waktu dan syarat-syarat

yang disetujui oleh kedua belah pihak. Unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah sebagai berikut :

a. Kepercayaan

Keyakinan pemberian kredit bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

b. Kesepakatan

Adanya kesepakatan antara pemberi kredit, kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjajian tertulis dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

c. Jangka waktu

Setiap kredit yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian kredit yang telah disepakati. Jangka waktu tersebut bisa berbentuk jangka waktu pendek, menengah, dan panjang.

d. Balas jasa

Merupakan keuntungan atas pemberian suatu kredit yang dikenal dengan nama bunga. Balas jasa dan administrasi ini merupakan keuntungan bagi pihak koperasi.

2.1.1.5 Jenis-Jenis Kredit

Menurut Arifin Sitio dan Halomoan Tamba (2001:119) dalam bukunya yang berjudul "Koperasi Teori dan Praktik". Secara umum, akses terhadap sumber permodalan, struktur permodalan dan kemampuan pemanfaatan modal oleh koperasi secara kelembagaan maupun oleh anggota-anggotanya secara individu atau sebagai pengusaha kecil, relatif masih rendah. Dalam melaksanakan kegiatan perkreditannya, koperasi memberikan berbagai macam fasilitas kredit sesuai dengan program dan kebijakan masing-masing koperasi. Untuk itu, sejak tahun 1998, Pemerintah secara intensif telah memberi fasilitas pendanaan melalui berbagai skema perkreditan, yang lebih dikenal dengan 17 skema perkreditan.

Ditinjau dari aspek skema, pendanaan, kredit dapat diklasifikasikan menjadi 2, yaitu :

1. Kredit bersubsidi, kredit ini disediakan Pemerintah dalam membiayai berbagai program disektor ekonomi dengan bunga yang rendah dan persyaratan yang ringan. Karena itu, kedit bersubsidi sering disebut kredit program.

   Ciri-ciri kredit ini adalah sebagai berikut :

   - dananya berasal dari Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI),
   - persyaratnnya ringan,

- sasarannya adalah masyarakat banyak, misalnya petani, anggota koperasi primer, usaha kecil, koperasi, kelompok tani,
- jangka waktu kredit relatif singkat,
- jangka kredit pada umumnya adalah produk dari usaha yang dibiayai oleh koperasi tersebut.

2. Kredit komersial, kredit ini diberikan oleh perbankan dengan persyaratan-persyaratan yang berlaku umum atau yang berlaku di pasar.

2.1.2 Analisis Variansi

Suatu rencana kerja dan anggaran yang baik akan dihitung berdasarkan *standard costing* untuk unit kegiatan tersebut. Hingga anggaran tersebut betul-betul akan dapat dipakai sebagai alat perencanaan dan pengendalian laba yang teliti.

2.1.2.1 Pengertian Analisis Variansi

Analisis variansi atau analisis selisih dimaksudkan untuk tujuan perencanaan atau pengendalian manajerial dalam konteks dalam konteks program Perencanaan dan Pengendalian Laba (LPP) yang komprehensif.

Menurut Mas'Ud Machfoedz Mahmudi mengemukakan pengertian analisis variansi atau analisis selisih adalah sebagai berikut :

"Analisis selisih (analisis varians) dilakukan dengan membandingkan antara biaya sesungguhnya dengan biaya yang seharusnya atau biaya standar".

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:234) dalam bukunya yang berjudul "Analisis Kritis atas Laporan Keuangan" pengertian analisis variansi adalah sebagai berikut :

"Analisis variansi adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggarannya".

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu selisih dapat dianggap menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dari analisis variansi ini diselidiki penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasi terjadinya selisih terutama selisih yang merugikan.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Analisis Variansi

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1999:72) dalam bukunya yang berjudul "Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan". Ada 2 metode yang biasa digunakan dalam melakukan analisa laporan keuangan:

1. *Single Varince Methode*

Dalam metode ini analissa variansi langsung diperbandingkan antara apa yang dianggarkan dengan realisasi yang dicapai oleh masing-masing mata anggaran yang bersangkutan. Kemudian selisih yang ada dapat berupa *favorable variance* dan sebaliknya akan berupa *unfavorable variance* apabila sifatnya negatif. Jika pendapatan yang dicapai lebih besar dari anggaran yang telah ditetapkan maka penyimpangan tersebut bersifat *favorable*. Hal ini ada beberapa kemungkinan yang perlu di analisa mungkin karena anggarannya yang ditetapkan terlalu kecil dan lain-lain.

2. *Two Variance Method*

Pada *two variance method* ini, misalnya dala jumlah biaya yang dikeluarkan telah terlampaui dari yang semula dianggarkan, tetapi karena volume usaha yang dicapai/lebih besar yang dianggarkan maka dalam metode pertama kesimpulan teteap bersifat negative, tetapi pada metode kedua akan memberikan kesimpulan yang positif.

2.1.2.3 Manfaat Analisis Variansi

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (1999:73) dalam bukunya yang berjudul "Analisa Laporan Keuangan untuk Perbankan". Manfaat dari analisis variansi adalah :

1. Untuk mengetahui sejauh mana penggunaan anggaran.
2. Untuk mengetahui sejauh mana realisasi yang dicapai dibandingkan dengan target.
3. Untuk penyimpangan-penyimpangan yang besar jumlahnya (*significance*) akan segera dapat diambil tindakan-tindakan koreksi yang diperlukan.

2.1.3 Anggaran

Tujuan didirikannya koperasi adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat atau untuk mengembangkan usaha yang sedang dijalani masyarakat banyak dan juga untuk mendapatkan pendapatan. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya perencanaan yang matang terhadap sumber daya yang tersedia agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan adanya suatu perangkat yang dapat membantu untuk melaksanakan tujuannya. Salah satunya adalah dengan anggaran, karena anggaran dapat

berfungsi sekaligus menyusun perencanaan dengan baik sehingga kegiatan pun akan berjalan dengan semestinya.

2.1.3.1 Pengertian Anggaran

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001:488) dalam bukunya yang berjudul "Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa" adalah sebagai berikut :

> " Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu setahun".

2.1.3.2 Karakteristik Anggaran

Menurut Mulyadi (2001:511) anggaran yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. anggaran disusun secara program,
2. anggaran disusun berdasarkan karakteristik pertanggung jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan,
3. anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian.

Berikut uraian mengenai karakteristik anggaran :

1. Anggaran disusun secara program

Proses manajemen perusahaan dimulai dengan perencanaan statejik (strategic planning) yang didalamnya terjadi proses penetapan tujuan

perusahaan dan penentuan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Setelah tujuan perusahaan ditetapkan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut dipilih, proses manajemen perusahaan kemudian diikuti dengan penyusunan program untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik.

Penyusunan program merupakan proses pengambilan keputusan mengenai program yang akan dilaksanakan oleh perusahaan dan penaksiran sumber yang dialokasikan kepada setiap program tersebut. Program merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan dalam perencanaan stratejik.

Rencana jangka panjang yang dituangkan dalam program memberikan arah kemana kegiatan perusahaan ditujukan dalam jangka panjang. Anggaran merinci pelaksanaan program, sehingga anggaran yang disusun setiap tahun memiliki arah seperti yang ditetapkan dalam rencana jangka panjang. Jika anggaran tidak disusun berdasarkan program, pada dasarnya perusahaan seperti berjalan tanpa tujuan yang jelas.

2. Anggaran disusun berdasarkan karakteristik pusat pertanggung jawaban yang dibentuk dalam organisasi perusahaan.

Menurut karakteristik masukan dan keluarannya, pusat pertanggung jawaban dalam perusahaan dibagi menjadi 4 golongan : pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba dan pusat investasi.

Proses pengendalian pusat biaya kebijakan dimulai dengan pembuatan anggaran biaya yang disetujui oleh manajemen puncak. Anggaran biaya ini merupakan batas atas pengeluaran biaya yang dapat dilakukan oleh manajer pusat biaya yang bersangkutan. Anggaran biaya ini bukan merupakan tolak ukur efisiensi, namun melebihi jumlah yang telah disetujui dalam anggaran.

Pusat pendapatan adalah pusat pertanggung jawaban yang manajernya diukur kinerjanya berdasarkan pendapatannya. Manajer pusat pendapatan tidak dimintai mengenai masukannya, karena dia tidak dapat mempengaruhi pemakaian masukan tersebut. Contoh pusat pendapatan ini adalah departemen pemasaran. Departemen pemasaran bertanggung jawab terhadap pencapaian pendapatan yang ditargetkan tanpa harus dibebani tanggung jawab atas biaya yang terjadi departemennya, karena biaya sering kali tidak mempunyai hubungan dengan pendapatan yang diperoleh departemen tersebut. Karena pada umumnya biaya-biaya yang terjadi dalam pusat pendapatan merupakan biaya kebijakan, maka pusat pendapatan umumnya juga merupakan pusat biaya kebijakan.

Pusat laba adalah pertanggung jawaban yang manajernya diukur dari selisih antara pendapatan dengan biaya untuk memperoleh pendapatan tersebut. Oleh karena itu dalam pusat laba, baik masukan maupun

keluarannya diukur dalam satuan rupiah untuk menghitung laba, yang dipakai sebagai pengukur kinerja manajernya.

Karena tiap-tiap tipe pusat pertanggung jawaban yang dibentuk dalam organisasi memiliki karakteristik pengendalian masing-masing tipe pusat pertanggung jawaban akan menghasilkan tolak ukur kinerja yang tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan pusat pertanggung jawaban yang diukur kinerjanya. Hal ini akan mengakibatkan perilaku yang tidak semestinya pada manajer pusat pertanggung jawaban dalam melaksanakan anggarannya.

3. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan dan alat pengendalian.

Agar proses penyusunan anggaran dapat menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat pengendalian, proses penyusunan anggaran harus mampu menanamkan "*sense of commitment*" dalam diri penyusunnya. Proses penyusunan anggaran yang tidak berhasil menanamkan "*sense of commitment*" dalam diri penyusunnya berakibat anggaran yang disusun tidak lebih hanya sebagai alat perencanaan berkala; yang jika tidak terjadi penyimpangan antara realisasi dan anggarannya tidak satupun manajer yang merasa bertangggungn jawab.

Untuk menghasilkan anggaran yang dapat berfungsi sebagai alat perencanaan dan sekaligus sebagai alat pengendalian, penyusunan anggaran harus memenuhi syarat berikut ini :

a. Partisipasi para manajer pusat pertanggung jawaban dalam proses penyusunan anggaran.
b. Organisasi anggaran.
c. Penggunaan informasi akuntansi pertangggung jawaban sebagai alat pengirim peran dalam proses penyusunan anggaran dan sebagai pengukur kinerja manajer dalam pelaksanaan anggaran.

2.1.3.3 Fungsi Anggaran

Menurut Mulyadi (2001: 502) fungsi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran merupakan hasil akhir proses penyusunan kerja.
2. Anggaran merupakan cetak biru aktivitas yang akan dilaksanakan perusahaan dimasa yang akan datang.
3. Anggaran berfungsi sebagai alat komunikasi intern yang menghubungkan berbagai unit organisasi dalam perusahaan dan yang menghubungkan manajer bawah dengan manajer atas.
4. Anggaran berfungsi sebagai tolak ukur yang dipakai sebagai pembanding hasil operasi sesungguhnya.

5. Anggaran berfungsi sebagai alat pengendalian yang memungkinkan manajemen menunjuk bidang yang kuat dan lemah bagi perusahaan.
6. Anggaran berfungsi sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi menajer dan karyawan agar senantiasa bertindak secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan organisasi.

2.1.3.4 Sistem Penyusunan Anggaran

Anggaran disusun dengan berbagai sistem-sistem yang dipengaruhi oleh pikiran-pikiran yang melandasi pendekatan tersebut.

Menurut Arifin Sabeni (2001:40) :

Sistem-sistem dalam penyusunan anggaran yang sering digunakan adalah:

"1. *Traditional Budget System*

2. *Performance Budget System*

3. *Planning, Programming, Budgeting System* (PPBS)"

Untuk lebih jelasnya, akan diuraikan dibawah ini :

1. *Traditional Budget System* (Sistem Anggaran Tradisional)

   Traditional Budget System adalah suatu cara menyusun anggaran yang tidak didasarkan atas pemikiran dan analisa rangkaian kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan

yang ditentukan. Penyusun lebih didasarkan pada kebutuhan untuk belanja / pengeluaran.

Dalam sistem ini, perhatian lebih banyak ditekankan pada pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran secara akuntansi yang meliputi pelaksanaan anggaran, pengawasan anggaran dan penyusunan pembukuannya. Pengelompokkan pos-pos anggaran didasarkan atas jatah tiap-tiap Departemen / Lembaga.

Sistem pertanggung jawabannya hanya menggunakan kwitansi pengeluaran saja, tanpa diperiksa dan diteliti apakah dana telah digunakan secara efektif / efisien atau tidak. Mula-mula pemerintah memberi jatah dana untuk tiap-tiap Departemen / Lembaga mengambil jatah tersebut dan menggunaknnya untuk melaksanakan kegiatannya sampai habis. Setelah dana tersebut sudah dipakai. Jadi tolak ukur keberhasilan anggaran tersebut adalah pada hasil kerja, maksudnya jika anggaran tersebut seimbang maka anggaran itu berhasil, tetapi jika anggaran tersebut defisit atau surplus, berarti anggaran tersebut gagal.

Jelaslah disini bahwa sistem anggaran tradisional lebih menekankan pada segi pertanggung jawaban keuangan (dana) dari sudut akuntansinya saja tanpa diuji efisien tidaknya penggunaan dan tersebut. Anggaran diartikan semata-mata sebagai alat dan

sebagai dasar legitimasi (pengabsahan) berapa besarnya pengeluaran negara dan berapa besarnya penerimaan yang dibutuhkan untuk menutup pengeluaran tersebut.

2. *Performance Budget System*

Performance Budget System berorientasi kepada pendayagunaan dana yang tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dari kegiatan yang dilaksanakan. Sistem penyusunan anggaran ini tidak hanya didasarkan kepada apa yang dibelanjakan saja, seperti yang terjadi didalam "*Traditional Budget*", tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan tertentu yang pelaksanaannya perlu disusun atau didukung oleh suatu anggaran biaya yang cukup dan biaya / dana yang dipakai tersebut harus dijalankan secara efektif dan efisien.

Jadi dalam sistem anggaran *performance* ini bukan semata-mata berorientasi kepada berapa jumlah uang yang dikeluarkan, tetapi sudah dipikirkan terlebih dahulu mengenai rencana kegiatan, apa yang akan dicapai, proyek apa yang akan dikerjakan dan bagaimana pengalokasian biaya agar digunakan secara efektif dan efisien.

Sistem ini mulai menitik beratkan pada segi penatalaksanaan (*management control*), sehingga dengan sistem ini efisiensi,

penggunaan dana diperiksa, juga hasil kerjanya. Pengelompokkan pos-pos anggaran didasarkan atas kegiatan dan telah ditetapkan suatu tolak ukur berupa standar biaya dan hasil kerjanya. Salah satu syarat utama untuk penerapan sistem ini adalah digunakannya sistem akuntansi biaya sebagai alat menentukan biaya masing-masing program dan akuntansi biaya sebagai alat untuk mengukur tingkat efisiensi pengeluaran dana.

Tolak ukur keberhasilan sistem anggaran ini adalah *performance* atau prestasi dari tujuan atau hasil anggaran itu dengan menggunakan dana secara efisien.

3. *Planning, Programming, Budget System* (PPBS)

Dalam PPBS ini perhatian banyak ditekankan kepada penyusunan rencana dan program. Rencana disusun sesuai dengan tujuan nasional yaitu kesejahteraan rakyat karena pemerintah bertanggung jawab dalam produksi dan distribusi barang-barang maupun jasa-jasa dan alokasi sumber-sumber ekonomi yang lain. Pengukuran manfaat penggunaan dana, dilihat dari sudut pengaruhnya terhadap lingkungan secara keseluruhan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelompokan pos-pos anggaran didasarkan atas tujuan-tujuan yang hendak dicapai dimasa yang akan datang.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam PPBS ini :

1. Untuk menerapkan sistem ini, dituntut kemampuan dan penyusunan rencana dan program secara terpadu.
2. Dibutuhkan informasi yang lengkap, baik informasi masa lalu maupun informasi yang akan datang yang relevan dengan kebutuhan penyusunan rencana dan program.

2.1.4 Realisasi

Pengertian realisasi, menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu :

"Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, cak wujud, kenyataan, pelaksanaan yang nyata".

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa realisasi merupakan sutau proses yanng harus diwujudkan untuk menjadi kenyataan dan dalam proses tersebut diperlukan adanya tindakan dan pelaksanaan yang nyata agar realisasi tersebut dapat sesuai dengan harapan yang diinginkan.

2.1.5 Perbandingan Anggaran Pemberian Kredit dan Realisasi Pemberian Kredit

Anggaran pemberian kredit merupakan rencana pemberian pinjaman kepada para anggota koperasi yang selama periode 1 tahun, sedangkan realisasi pemberian kredit merupakan pelaksanaan yang nyata koperasi dalam memberikan

kredit kepada anggota koperasi. Dengan demikian keduanya mempunyai hubungan dimana anggaran tidak akan tercapai tanpa adanya realisasi yang akan diwujudkan dalam pemberian kredit kepada anggota koperasi.

2.2 Kerangka Pemikiran

Koperasi didalam memberikan kredit, tentunya untuk mencapai tujuan yang diinginkan diperlukan adanya perencanaan yang matang terhadap sumber daya yang tersedia agar dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Dengan adanya kondisi tersebut diperlukan adanya suatu perangkat yang dapat membantu untuk melaksanakan tujuannya. Salah satunya adalah dengan anggaran, karena anggaran dapat berfungsi sekaligus menyusun perencanaan dengan baik sehingga kegiatan pun akan berjalan dengan semestinya (pelaksanaan yang nyata) atau yang biasa disebut dengan realisasi.

Pengertian anggaran menurut Mulyadi (2001:488) dalam bukunya yang berjudul “Akuntansi Manajemen: Konsep, Manfaat, dan Rekayasa” adalah sebagai berikut:

> “ Anggaran merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif, yang diukur dalam satuan moneter standar dan satuan ukuran yang lain, yang mencakup jangka waktu setahun”.

Pengertian realisasi, menurut Kamus Bahasa Indonesia yaitu :

“Realisasi adalah proses menjadikan nyata, perwujudan, cak wujud, kenyataan, pelaksanaan yang nyata”.

Menurut Sofyan Syafri Harahap (2009:234) dalam bukunya yang berjudul “Analisis Kritis atas Laporan Keuangan” pengertian analisis variansi adalah sebagai berikut :

“Analisis variansi adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan realisasi dibandingkan dengan anggarannya”.

Berdasarkan pernyataan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu selisih dapat dianggap menguntungkan atau tidak menguntungkan. Dari analisis variansi ini diselidiki penyebab terjadinya, untuk kemudian dicari jalan keluar untuk mengatasi terjadinya selisih terutama selisih yang merugikan.